

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Iwan Niswanto¹, Deddy S. Bratakusumah²
Program Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta 11510
iwan@yahoo.com

Abstrak

Presidential Decree No. 26 Year 2010 on Transparency of State Revenues and Regional Income Gained from Extractive Industries is a formal basis for the implementation process of Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). This research is a quantitative research. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis, to measure the size of communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure can explain the dependent variable of the implementation of state income transparency policy from extractive industry. Hypothesis test is done by t-test to test the influence of independent variable partially to dependent variable. Meanwhile, F-test is used to test the independent variable simultaneously. The results of this study indicate that there are significant influences of communication, human resources, disposition and bureaucratic structure to the implementation of the state revenue transparency policy from extractive industry of 60.7 percent simultaneously. However, only disposition factors have no positive effect on the success rate of the policy. Meanwhile, the other three factors give a significant influence where the bureaucracy structure factor has a regression coefficient of 0.353, followed by resource factor with regression coefficient 0,184, and communication with regression coefficient 0,214, The results of this research may form a recommendation for the Coordinating Ministry for Economic Affairs to improve the planning documents' utilization and increase the involvement of human resources in order to succeed the implementation of state revenue transparency policy from extractive industries.

Keywords : *implementation of policy, transparent of national income, coordinating ministry for economic affairs*

Abstrak

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif merupakan suatu landasan formal terhadap proses implementasi EITI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi dapat menjelaskan variabel dependen implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komunikasi, sumber daya manusia, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif simultan sebesar 60,7 persen. Namun, hanya faktor disposisi yang tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Sedangkan ketiga faktor lainnya memberikan pengaruh yang signifikan, dimana faktor struktur birokrasi memiliki koefisien regresi 0,353, disusul faktor sumberdaya dengan koefisien regresi 0,184 dan komunikasi dengan koefisien regresi 0,214. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperbaiki penggunaan/pemanfaatan dokumen perencanaan dan meningkatkan jumlah dan keterlibatan SDM demi menyukseskan implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, transparansi pendapatan negara, kementerian koordinator bidang perekonomian*

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tata kelola yang baik, transparansi adalah kunci pertama. Dari sudut pandang bisnis, transparansi akan memberikan informasi yang setara kepada semua pihak secara simetri. Dari kacamata masyarakat, transparansi dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber daya alam yang diekstrak dari wilayahnya. Dari sudut pandang Pemerintah, transparansi akan memudahkan proses komunikasi dan informasi. Dengan informasi tersebut, publik dapat melakukan *check and balance* demi perbaikan sektor ini di masa depan.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya transparansi industri ekstraktif. Untuk itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyampaikan komitmen untuk melaksanakan transparansi kepada sebuah lembaga independen *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) untuk menjadi salah satu anggotanya. EITI atau Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi migas dan pertambangan. Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktik *good governance*.

Setelah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadi negara pelaksana EITI, pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif sebagai bentuk landasan formal untuk menjalankan komitmen tersebut. Peraturan Presiden 26 tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif ini dilaksanakan oleh sebuah Tim Transparansi yang terdiri dari perwakilan pemerintah; perwakilan perusahaan migas dan tambang; perwakilan pemerintah daerah; serta perwakilan masyarakat sipil. Dengan kata lain, pekerjaan ini merupakan lintas Kementerian serta lintas stakeholders.

Sejalan dengan terbitnya Perpres tersebut serta dibentuknya Tim Transparansi di bulan April 2010, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010, Dewan EITI Internasional mengakui Indonesia menjadi negara pelaksana EITI dengan status sebagai *candidate country*. Pada bulan Oktober 2014 status Indonesia

meningkat menjadi *compliant country*. Hingga saat ini, Tim Transparansi telah mengesahkan laporan EITI yang meliputi laporan tahun 2009, 2010, 2011, 2012-2013, 2014. Isi laporan EITI 2014 disesuaikan dengan persyaratan di dalam standar EITI yang baru (*EITI Standard 2013*) yaitu selain aspek rekonsiliasi penerimaan negara (*revenue streams*), juga mengenai keterbukaan informasi kontekstual industri ekstraktif Indonesia.

Setelah diterbitkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang mengubah paradigma. Pemerintah selalu menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan negara serta telah menyatakan dukungannya pada *open government*. Era teknologi informasi memungkinkan peran masyarakat secara lebih luas dan aktif. Peran masyarakat madani di Indonesia yang sudah berkembang pesat menjadi pendorong keterbukaan.

Keterbukaan diharapkan menjadi salah satu pemicu dan pemacu reformasi birokrasi lintas - sektor dan lintas - institusi. Selain itu keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu karakteristik dari implementasi *good governance* tersebut adalah dikedepankannya prinsip transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi atau keterbukaan (*openness*) tidak saja mengarah akan adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi serta evaluasi terhadap sebuah kebijakan, akan tetapi juga terbukanya kesempatan bagi khalayak untuk memberikan tanggapan, usul, bahkan kritik atas berbagai kebijakan pemerintah. *Good governance* disemangati oleh 5 (lima) unsur utama yaitu: penegakan hukum (*rule of law*), akuntabilitas, transparansi atau keterbukaan (*openness*), profesionalisme, dan partisipasi. Unsur transparansi menghendaki adanya kejelasan arah tentang mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, ditambah pula tersedianya keterbukaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Ditambah dengan partisipasi yang merupakan bentuk dari terbukanya akses bagi seluruh stakeholder

untuk ikut serta dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 April 2010. Ini merupakan suatu landasan formal terhadap proses implementasi EITI di Indonesia dengan mengutamakan prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan umum, *good governance*, transparansi, *sustainable development* serta keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, NGOs, CSO serta kalangan bisnis sesuai prinsip-prinsip dan kriteria dari EITI.

Kelompok multi-pemangku kepentingan di Indonesia diwujudkan dalam sebuah tim yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, yaitu Tim Transparansi. Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah (*Steering Team*) diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, anggota tim ini terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Prof. Dr. Emil Salim. Tim Pengarah bertugas menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Dilatarbelakangi oleh sejumlah fakta di atas, peneliti tertarik untuk mendalaminya melalui penelitian ini dengan mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka, sebuah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik peneliti anggap dapat menggambarkan masalah yang mengemuka dalam implementasi kebijakan Transparansi Pendapatan Negara yang diperoleh dari Industri Ekstraktif pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Teori Kebijakan Publik

Secara teoretik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian ini. Kata "kebijakan" merupakan terjemahan dari *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan

untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin, 2012: 3)

Sedangkan secara etimologis, *policy* berasal dari kata "polis" dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi "*politia*" yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi "*policie*" yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003: 7). Unikny, dalam bahasa Indonesia kata kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* tersebut mempunyai konotasi tersendiri. Kata tersebut mempunyai akar kata bijaksana atau bijak yang dapat disamakan dengan pengertian *wisdom* yang berasal dari kata sifat *wise* dalam bahasa Inggris.

Melalui pengertian ini, sifat bijaksana dibedakan orang dengan sekadar pintar (*clever*) atau cerdas (*smart*). Pintar dapat berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sedangkan cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan jawaban terhadap suatu persoalan yang dihadapi dengan cepat (Abidin, 2012: 4)

Sementara pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or not to do*". Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2012:7).

Thomas R. Dye, dalam Miftah Thoha (2011: 107) mengemukakan *public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

David Easton, dalam Miftah Thoha (2011: 107) merumuskan kebijakan publik sebagai, “*the uthoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values.*” (alokasi otoritatif nilai bagi seluruh masyarakat, tetapi ternyata bahwa hanya pemerintah otoritatif dapat bertindak pada 'seluruh' masyarakat, dan semuanya pemerintah dipilih untuk melakukan atau tidak melakukan hasil dalam alokasi nilai-nilai).

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

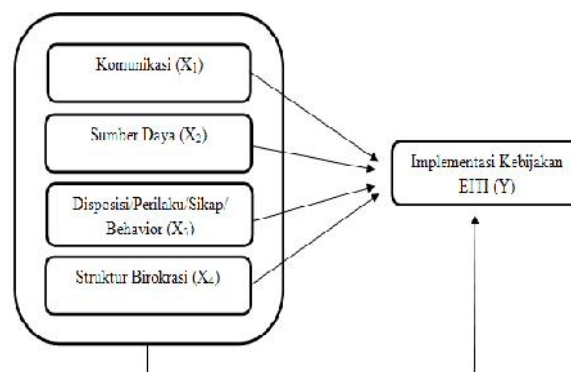
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut;

1. Hipotesis 1 (H_1), ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap keberhasilan implementasi EITI yang dilakukan Kemenko Perekonomian.
2. Hipotesis 2 (H_2), ada pengaruh yang signifikan antara sumberdaya terhadap keberhasilan implementasi EITI yang dilakukan Kemenko Perekonomian.
3. Hipotesis 3 (H_3), ada pengaruh yang signifikan antara disposisi terhadap keberhasilan implementasi EITI yang dilakukan Kemenko Perekonomian.
4. Hipotesis 4 (H_4), ada pengaruh yang signifikan antara struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi EITI yang dilakukan Kemenko Perekonomian.
5. Hipotesis 5 (H_5), ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi EITI yang dilakukan Kemenko Perekonomian.



Gambar 1
Kerangka penelitian

Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner berupa pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dibuat dengan menggunakan skala interval, untuk memperoleh data yang jika diolah menunjukkan pengaruh atau hubungan antara variable.

Uji Kualitas data

Bivariate Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson)

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada tiga metode korelasi sederhana (bivariate correlation) diantaranya Pearson Correlation, Kendall's tau-b, dan Spearman Correlation. Pearson Correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall's tau-b, dan Spearman Correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal.

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 0,00 - 0,199 = sangat rendah; 0,20 - 0,399 = rendah; 0,40 - 0,599 = sedang; 0,60 - 0,799 = kuat; 0,80 - 1,000 = sangat kuat.

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian persyaratan analisis dan hasilnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, langkah berikutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang didukung oleh data empirik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui korelasi antara variabel komunikasi (X₁), sumber daya (X₂), disposisi (X₃), dan struktur birokrasi (X₄) dengan variabel Implementasi Kebijakan Transparansi Pendapatan Negara dari Industri Ekstraktif (Y). Tujuan menghitung nilai koefisien determinasi untuk menerangkan model kemampuan variasi variabel bebas (*independen*) dalam memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (*dependen*). Uji-F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (*independen*) secara simultan terhadap variabel terikat (*dependen*). Sedangkan Uji-t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (*independen*) secara parsial terhadap variabel terikat (*dependen*). Penghitungan pengujian hipotesis antara variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat

(*dependen*), dilakukan dengan bantuan SPSS versi 24. Di bawah ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (R²), Uji-F, dan Uji-t.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Koefisien dan t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3,080	2,845		1,083	,285
KDM	,214	,112	,215	1,915	,062
SD	,184	,091	,269	2,265	,028
DIS	,085	,094	,100	,899	,373
BIR	,353	,099	,405	3,569	,001

a. Dependent Variable: IMP

Berdasarkan tabel 4.44 di atas, dapatlah dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,080 + 0,214X_1 + 0,184X_2 + 0,085X_3 + 0,353X_4$$

Nilai konstanta sebesar 3,080; berarti variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y) adalah sebesar 3,080, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X₁), sumber daya (X₂), disposisi (X₃), dan struktur birokrasi (X₄) adalah konstan.

Nilai koefisien variabel komunikasi (X₁) sebesar 0,214; berarti variabel komunikasi (X₁) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel komunikasi (X₁) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Jika terjadi kenaikan variabel komunikasi (X₁) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y) sebesar 0,214 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya (X₂), disposisi (X₃), dan struktur birokrasi (X₄) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel sumber daya (X₂) sebesar 0,184; berarti variabel sumber daya (X₂) mempunyai hubungan yang positif dengan

variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel sumber daya (X_2) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Jika terjadi kenaikan variabel sumber daya (X_2) sebesar satu persen, maka akan menaikkan implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y) sebesar 0,184 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), disposisi (X_3), dan struktur birokrasi (X_4) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel disposisi (X_3) sebesar 0,085; berarti variabel disposisi (X_3) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel disposisi (X_3) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Jika terjadi kenaikan variabel disposisi (X_3) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y) sebesar 0,085 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan struktur birokrasi (X_4) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar 0,353; berarti variabel struktur birokrasi (X_4) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel struktur birokrasi (X_4) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y). Jika terjadi kenaikan variabel struktur birokrasi (X_4) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif (Y) sebesar 0,353 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), dan disposisi (X_3) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Komunikasi secara parsial berpengaruh kurang cukup kuat terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif dapat diterima; 2) Sumber daya secara parsial berpengaruh cukup kuat terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara sumber daya terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif dapat diterima; 3) Disposisi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara disposisi terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif ditolak; 4) Sistem birokrasi secara parsial berpengaruh paling kuat terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem birokrasi terhadap implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif dapat diterima.

Secara simultan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif artinya implementasi kebijakan tersebut sudah cukup berhasil meskipun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi pendapatan negara dari industri ekstraktif

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Ahmad, Jamaludin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Azwar, Saifuddin. (1995). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen, Steven. Eimicke, William. Heikkila, Tanya. (2011). *Menjadi Manager Efektif*. Jakarta. PPM Manajemen.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- EITI Indonesia. (2014). *Laporan Konstekstual EITI 2014*. Jakarta : Kemenko Perekonomian.
- EITI Indonesia. (2015). *Laporan Konstekstual EITI 2015*. Jakarta : Kemenko Perekonomian.
- Hasan, Erliana. (2007). *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasibuan, Malayu SP. (2016). *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Mulyadi Deddy. (2015). *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : CV Alfabeta .
- Nugroho, Riant. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pace, R. Wayne & Don. F. Faules. (2006). *Komunikasi Organisasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang *Transparansi Pendapatan Negara/Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif*.
- Santoso, Singgih. (2017). *Menguasai Statistik dengan SPSS 24*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Press Indonesia.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Uno, Hamzah B. (2007). *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S.A. (1991). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi II*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. et.al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.